

BAB 1

KINERJA DAN PROSPEK EKONOMI GLOBAL: PEMULIHAN BELUM BERIMBANG, KETIDAKPASTIAN PASAR KEUANGAN BERLANJUT





Perbaikan ekonomi global pada 2021 terus berlanjut meski belum berimbang dengan pemulihan ekonomi di *Advanced Economies* (AEs) yang lebih cepat dibandingkan dengan ekonomi negara *Emerging Market and Developing Economies* (EMDEs) akibat perbedaan tingkat vaksinasi dan kemampuan stimulus kebijakan masing-masing negara. Ketidakpastian pasar keuangan global masih berlanjut seiring dengan risiko yang masih mengemuka, antara lain terkait peningkatan penyebaran Covid-19 varian Delta, antisipasi pasar terhadap kebijakan penurunan stimulus (*tapering*) the Fed, serta kekhawatiran tekanan inflasi yang berlangsung lebih lama. Pandemi Covid-19 juga menimbulkan setidaknya 7 (tujuh) hal penting yang perlu diwaspadai dan diantisipasi dengan baik agar mendukung pemulihan ekonomi global yang diperkirakan berlanjut pada 2022. Koordinasi kebijakan internasional, termasuk agenda Presidensi Indonesia di G20 pada 2022, ditempuh untuk terus memperkuat pemulihan ekonomi global yang sedang berjalan.

Perbaikan ekonomi global pada 2021 terus berlanjut meski belum berimbang dengan ketidakpastian pasar keuangan yang berlanjut. Pemulihan ekonomi di AEs, khususnya Amerika Serikat (AS) berjalan lebih cepat, didukung oleh akselerasi vaksinasi dan stimulus kebijakan fiskal dan moneter yang sangat besar. Sementara di sisi lain, sebagian besar EMDEs, kecuali Tiongkok, masih harus berjuang memperbaiki kondisi ekonomi di dalam negerinya, menuju pemulihan ekonomi. Disamping pasokan dan kemampuan vaksinasi yang terbatas, keterbatasan kemampuan stimulus fiskal dan moneter juga menyebabkan lebih lambatnya proses pemulihan ekonomi di sebagian besar EMDEs. Ekonomi dunia diperkirakan tumbuh sekitar 5,7% pada 2021 dan 4,4% pada 2022, setelah kontraksi 3,1% pada 2020. Sementara itu, ketidakpastian pasar keuangan global masih terus berlanjut sejalan dengan risiko yang masih mengemuka, antara lain terkait peningkatan penyebaran Covid-19 varian Delta, antisipasi pasar terhadap kebijakan *tapering* the Fed, serta kekhawatiran tekanan inflasi yang berlangsung lebih lama akibat gangguan rantai pasokan dan keterbatasan energi.

Pandemi menimbulkan sejumlah permasalahan dan tantangan yang perlu diwaspadai dan diantisipasi. Proses pemulihan perekonomian global dari dampak pandemi Covid-19 terus berlangsung, dengan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang telah membaik dan tetap terjaga. Meski demikian, pandemi menimbulkan setidaknya 7 (tujuh) hal penting yang perlu diwaspadai dan diantisipasi secara baik: *Pertama*, masih belum meratanya vaksinasi untuk mencapai imunitas massal. *Kedua*, ketidakseimbangan dalam proses pemulihan ekonomi global, lebih cepat di AEs dan masih berjalan lambat di EMDEs. *Ketiga*, terjadinya gangguan dalam mata rantai pasokan barang dan jasa global serta munculnya ancaman kelangkaan energi. *Keempat*, ketidaksinkronan rencana kebijakan moneter dan fiskal untuk kembali ke kenormalan baru (*exit policy*)

"Perbaikan ekonomi global pada 2021 terus berlanjut meski belum berimbang"

antara AE dan EMDEs, serta dampak ketidakpastian pasar keuangan global yang ditimbulkannya. *Kelima*, dampak luka memar (*scarring effect*) dari pandemi terhadap kondisi dunia usaha dan risiko yang dapat terjadi terhadap keberlanjutan pemulihan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan. *Keenam*, demikian cepatnya digitalisasi ekonomi-keuangan dengan dominasi sejumlah pemain teknologi besar (*BigTech*) dunia dan akan semakin meluasnya sistem pembayaran antarnegara. *Ketujuh*, semakin kuatnya tuntutan atas ekonomi hijau (*green economy*) dan keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) dari AEs yang perlu dipersiapkan secara baik transisinya oleh EMDEs.

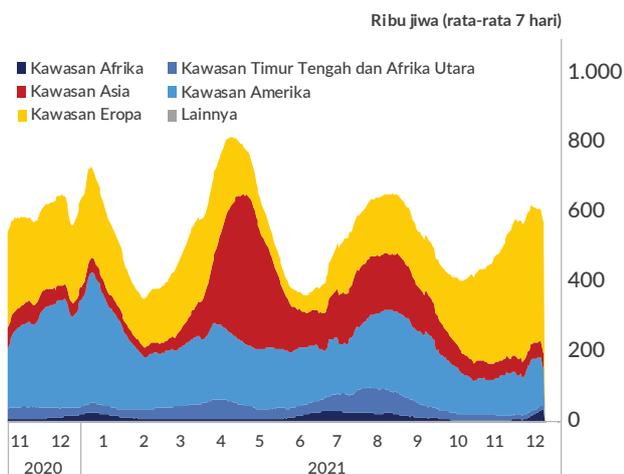
Sejumlah langkah koordinasi kebijakan internasional ditempuh untuk terus memperkuat pemulihan ekonomi global dan mengatasi berbagai permasalahan yang muncul. Sejumlah agenda penting mengemuka di forum-forum Group of Twenty (G20), International Monetary Fund (IMF), Financial Stability Board (FSB), Bank for International Settlements (BIS), World Bank, maupun lainnya, terutama mengenai perluasan pasokan dan distribusi vaksin dari AEs ke EMDEs, penahapan dan kejelasan komunikasi dalam *exit policy*, langkah-langkah bersama mengatasi gangguan dalam mata rantai pasokan global, kelangkaan energi, dan *scarring effect*, serta kerja sama internasional dalam mengakselerasi digitalisasi dan ekonomi-keuangan hijau. Selaras dengan hal tersebut, agenda Presidensi Indonesia pada G20 pada tahun 2022 adalah mendukung pemulihan ekonomi global yang lebih kuat dan berimbang (*Recover Together, Recover Stronger*) melalui 6 (enam) agenda prioritas pada jalur keuangan.

1.1

Masih Belum Meratanya Vaksinasi dan Risiko Endemi Covid-19

Pandemi Covid-19 masih membayangi perekonomian global selama 2021. Pada awal tahun 2021, penyebaran Covid-19 sempat menurun, terutama di AS dan Eropa (Grafik 1.1). Vaksin yang akhirnya siap untuk diberikan kepada masyarakat luas hadir pada saat yang tepat untuk memerangi varian baru Covid-19 saat itu, yakni varian Alpha. Penyebaran varian Alpha pada akhir 2020 terutama terjadi di belahan barat dunia, dengan tingkat penularan 40 – 80% lebih tinggi dibanding varian awal Covid-19, yakni varian Wuhan. Pada akhir triwulan I 2021, Inggris yang menjadi lokasi awal penyebaran varian Alpha telah melakukan vaksinasi, setidaknya satu dosis, untuk 45,5% populasinya, menyusul AS dan Eropa sebesar 29,2% dan 11,7% populasi. Tingkat vaksinasi tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat vaksinasi di EMDEs yang baru mencapai 4,6% populasi. Langkah ini berhasil menurunkan kenaikan penyebaran Covid-19, sebagaimana tercermin pada kasus harian di AS yang turun menjadi sekitar 52 ribu dari puncak gelombang varian Alpha sebesar 251 ribu. Kondisi serupa juga terjadi di berbagai negara di Kawasan Eropa, seperti di Inggris dan Perancis.

Grafik 1.1. Perkembangan Kasus Harian Covid-19



Sumber: World Health Organization, diolah

Penurunan Covid-19 di awal tahun hanya berlangsung sementara seiring dengan merebaknya varian Delta di India pada April 2021. World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa varian Delta dua kali lebih infeksius dibandingkan dengan varian Covid-19 yang muncul pertama kali, bahkan 50% lebih infeksius dibandingkan dengan varian yang telah teridentifikasi dan tergolong sebagai *variant of concerns*, antara lain Alpha, Beta, dan Gamma. Penyebaran yang semula hanya terjadi di salah satu negara bagian di India, Maharashtra terus meluas ke seluruh India. Protokol kesehatan yang minim dan tingkat vaksinasi yang rendah di India semakin memicu pesatnya penyebaran, dengan kasus harian tertinggi di India tercatat sebesar 415 ribu jiwa, menjadikan India negara ketiga dengan kasus tertinggi di dunia. Kenaikan kasus di sebagian besar negara di Kawasan Asia menjadi tidak terelakkan bahkan terus meluas ke seluruh dunia. Kondisi tersebut diperparah dengan tidak meratanya distribusi vaksin untuk imunitas massal di AEs dan di EMDEs. Penduduk di EMDEs Asia yang memiliki tingkat vaksinasi rendah menjadi sasaran penyebaran varian Delta, antara lain di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina dan banyak negara lain. Varian Delta yang lebih ganas dampaknya pada kesehatan menyebabkan kenaikan tingkat fatalitas di Asia yang cepat hingga mencapai 1,54% pada akhir Agustus 2021 dan melandai setelahnya (Grafik 1.2). Di sisi lain, pembukaan ekonomi yang berlangsung lebih cepat di AEs turut menjadikannya rentan terhadap penularan Covid-19.

Kemungkinan munculnya varian baru Covid-19 dan risiko pandemi akan berlangsung lama dan bahkan menjadi endemi perlu diwaspadai dampaknya terhadap pemulihan ekonomi dunia. Pemerintah dan otoritas terkait di berbagai negara perlu menyusun strategi jangka panjang untuk mengantisipasi kemungkinan Covid-19 akan tetap ada dalam waktu yang lama. Rancangan persiapan ke kenormalan baru dengan hidup bersama Covid-19 perlu terus diperkuat, termasuk langkah transisi dan



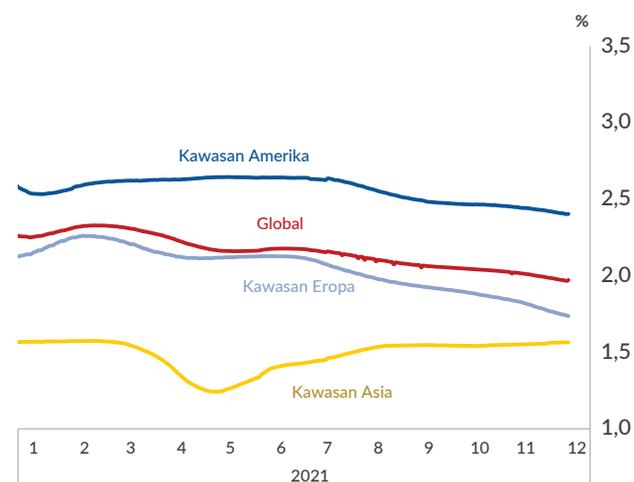
adaptasi oleh masyarakat untuk tetap berdisiplin dan membiasakan diri dengan protokol kesehatan sebagai jalan menuju tatanan kehidupan baru. Strategi pemenuhan penanganan Covid-19 juga terus diperkuat baik melalui akselerasi vaksinasi, peningkatan *testing*, *tracing*, dan *treatment*, serta disiplin dalam protokol kesehatan. Langkah-langkah tersebut akan memperkuat ketahanan perekonomian global terhadap kemungkinan terus berlanjutnya penyebaran Covid-19 dan memastikan keberlanjutan proses pemulihan ekonomi dunia lebih lanjut.

Akselerasi vaksinasi dalam rangka mencapai imunitas massal terus dilakukan di seluruh belahan dunia untuk mengatasi Covid-19. Tingkat vaksinasi yang tinggi ini berdampak positif pada tingkat kematian dunia yang cenderung stabil di sekitar 2%, di tengah kenaikan kasus harian Covid-19 yang berkali-kali membentuk gelombang baru selama 2021. Selain

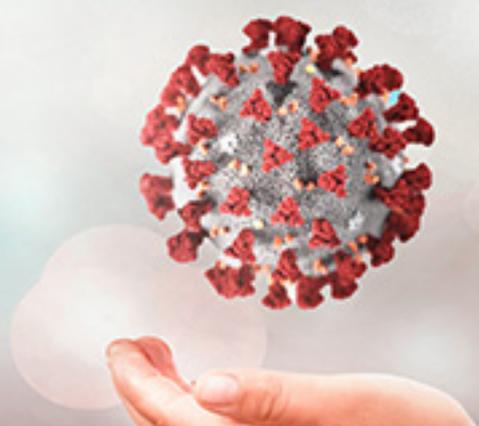
itu, terbentuknya imunitas massal menjadi prioritas kebijakan banyak negara di dunia untuk mengatasi pandemi. Negara dengan vaksinasi tinggi mengalami keuntungan pada saat merebaknya varian Delta, sebagaimana terlihat pada tingkat keparahan gejala, hospitalisasi dan kematian yang relatif rendah. Dalam rangka mendukung vaksinasi, beberapa negara bahkan mengeluarkan paspor vaksin untuk masyarakatnya sebagai dokumen pendukung agar diizinkan melakukan aktivitas di berbagai ruang publik. Pada perkembangannya masyarakat beradaptasi dengan menerapkan protokol kesehatan yang berawal dari diri sendiri, antara lain dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Adaptasi perilaku tersebut, ditambah dengan praktik *work/school from home* yang diterapkan sejak awal pandemi pada akhirnya memungkinkan terbentuknya keseimbangan baru dalam pergerakan masyarakat. Salah satu contoh adalah mobilitas di AS dan beberapa negara di Eropa pada triwulan III 2021 masih terus melanjutkan peningkatan, di tengah kenaikan kasus Covid-19 di negara tersebut (Grafik 1.3).

Akselerasi vaksinasi tidak merata antara AEs dan EMDEs. Akses terhadap vaksin di AEs lebih besar didukung oleh teknologi serta ketersediaan dana yang lebih besar. Pasokan berdasarkan kontrak vaksin di AEs adalah sebesar lebih dari tiga kali lipat penduduk di AEs, bahkan di Kanada dan Australia mencapai lima kali lipat jumlah penduduk (Grafik 1.4). Jumlah ini sangat tinggi dibandingkan dengan pasokan vaksin di EMDEs yang belum mencapai seluruh populasi, yakni hanya 60%. Di EMDEs, hanya sedikit yang sudah memenuhi kontrak vaksin, setidaknya untuk seluruh

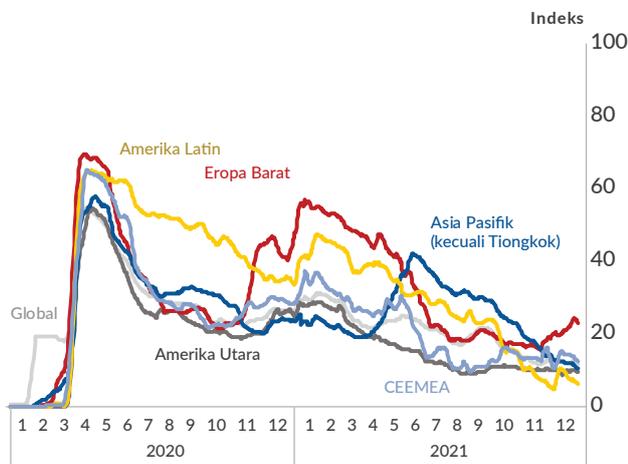
Grafik 1.2. Tingkat Fatalitas Covid-19 Global



Sumber: World Health Organization, diolah



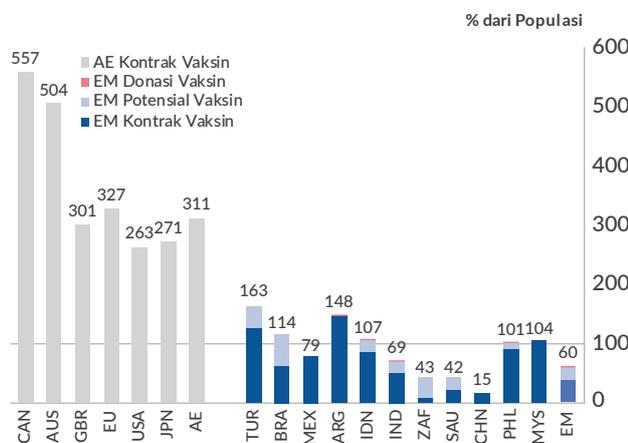
Grafik 1.3. Tingkat Mobilitas Dunia



Sumber: Goldman Sachs, diolah; Effective Lockdown Index=100, mobilitas paling rendah

populasi, yakni Malaysia, Filipina, dan Argentina. Kontrak vaksin di Afrika Selatan, Arab Saudi, dan Meksiko bahkan baru dapat memenuhi kurang

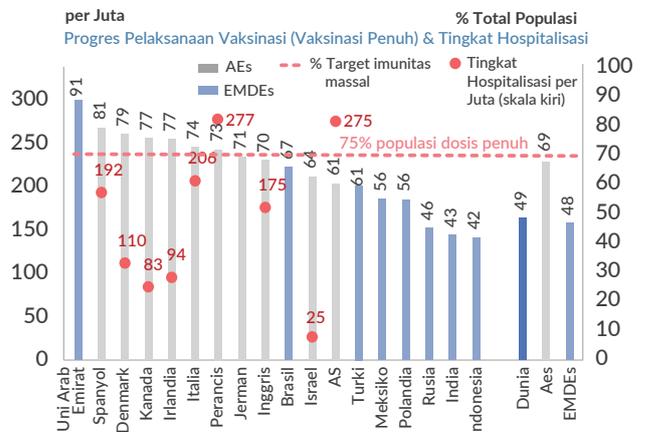
Grafik 1.4. Kontrak Vaksin Dunia



Sumber: Kementerian Kesehatan, Duke University, World Health Organization Keterangan: memperhitungkan vaksin dosis penuh, khusus Johnson & Johnson dan Cansino diasumsikan dosis penuh 2 (dua) kali

dari setengah penduduknya. Upaya pemerataan telah dilakukan melalui donasi vaksin dari AEs ke EMDEs, antara lain dari AS ke Argentina dan Filipina. Tiongkok juga merupakan salah satu EMDEs yang mengembangkan vaksin di negaranya sendiri dan turut melakukan donasi, terutama kepada beberapa negara di Afrika. Pada akhir Desember 2021, statistik mencatat jumlah masyarakat dunia terdinasasi penuh adalah sebesar 49%, dengan populasi AEs telah hampir 70% dan EMDEs sekitar 50% (Grafik 1.5). Beberapa AEs bahkan sudah mencapai imunitas massal dengan tingkat vaksinasi di atas 75%, yakni di Spanyol, Denmark, Kanada, dan Irlandia. Ketidakmerataan kecepatan vaksinasi ini menjadi salah satu penyebab perbaikan mobilitas yang lebih tertahan di EMDEs dibandingkan AEs, kemudian berdampak pada pemulihan aktivitas ekonomi global yang belum seimbang.

Grafik 1.5. Tingkat Vaksinasi Negara



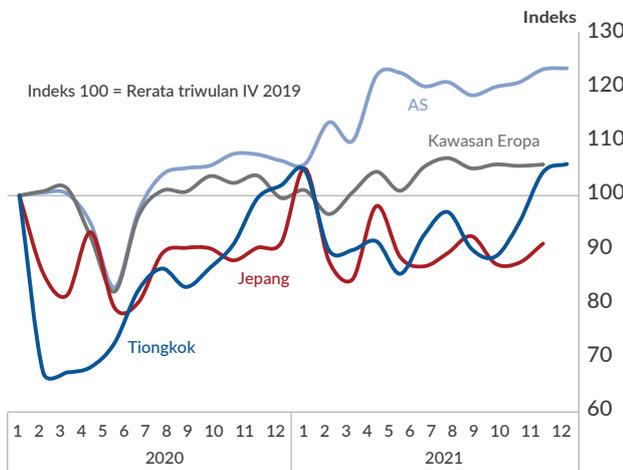
Sumber: Our World In Data, Kementerian Kesehatan Ket : Perkembangan vaksinasi Indonesia dengan kalkulasi Total Vaksinasi/2/Populasi = 51,96%

1.2

Ketidakseimbangan Proses Pemulihan Ekonomi Global

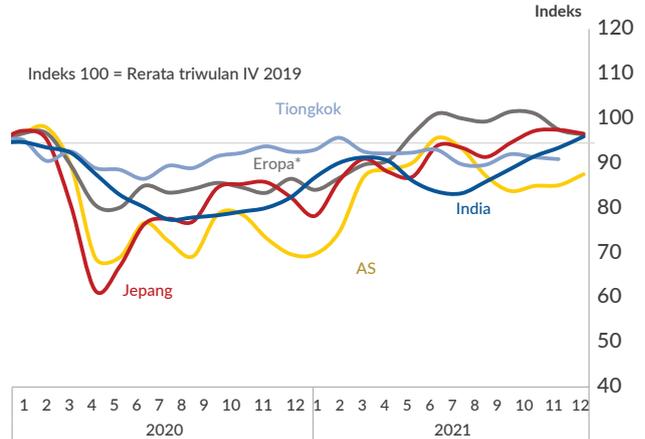
Perbaikan ekonomi yang cepat pada awal tahun 2021, kembali tertahan seiring dengan merebaknya Covid-19 varian Delta. Sejumlah indikator menunjukkan kenaikan aktivitas perekonomian yang relatif cepat pada triwulan I 2021, terutama di AEs. Dalam perkembangannya, kebijakan pembatasan mobilitas untuk mengendalikan penyebaran varian Delta berpengaruh pada aktivitas ekonomi sebagaimana tercermin pada indeks keyakinan konsumen dan penjualan ritel di berbagai negara, dengan besaran dampak tergantung pada tingkat vaksinasi serta persepsi konsumen atas kekhawatiran gelombang lanjutan Covid-19. Di AEs, misalnya, indeks penjualan ritel yang meningkat cepat sejak penghujung 2020 kemudian melandai sejak Maret 2021 di AS dan Juli 2021 di Eropa (Grafik 1.6). Bahkan indeks keyakinan konsumen menurun lebih tajam di AS dibandingkan dengan di Eropa (Grafik 1.7). Di Tiongkok, indeks penjualan ritel dan keyakinan konsumen melandai sejak Juni 2021, sementara indeks keyakinan konsumen di India yang menurun sejak munculnya varian Delta pada Februari kembali membaik sejak Juli 2021. Pola perbaikan penjualan ritel ini selanjutnya juga berpengaruh terhadap melandainya pertumbuhan konsumsi. Penyebaran varian Delta dan pembatasan mobilitas juga berpengaruh pada indeks keyakinan bisnis, *Purchasing*

Grafik 1.6. Indeks Penjualan Ritel



Sumber: CEIC, diolah

Grafik 1.7. Indeks Keyakinan Konsumen



Sumber: Bloomberg, diolah

*) Rerata tertimbang Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Jerman, Perancis, Italia, dan Spanyol

Managers' Index (PMI), yang selanjutnya berpengaruh pada tingkat produksi dan investasi. Aktivitas ekonomi kemudian berangsur-angsur membaik sejak triwulan III 2021, seiring dengan menurunnya kasus varian Delta dan meningkatnya kembali mobilitas manusia.

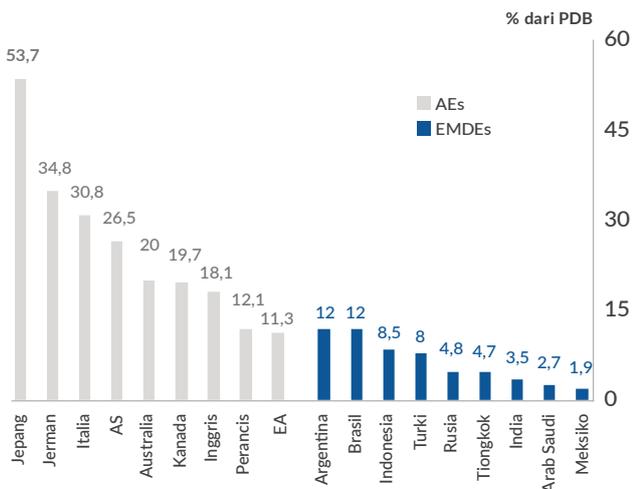
Perbaikan ekonomi global terus berlanjut sepanjang tahun 2021, meski belum berjalan seimbang.

Kecepatan tingkat perbaikan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh tingkat vaksinasi untuk mencapai imunitas massal, besarnya stimulus kebijakan fiskal dan moneter, serta tingkat daya tahan ekonomi. Di AEs, khususnya AS, pemulihan ekonomi berjalan lebih cepat, di dukung oleh stimulus fiskal dan moneter yang sangat besar. Stimulus pemerintah dan bank sentral dimaksud melalui program vaksinasi, bantuan sosial dan dunia usaha, serta penambahan likuiditas (*quantitative easing*) yang sangat besar ke sistem keuangan. Sementara di sisi lain, sebagian besar EMDEs, kecuali Tiongkok, masih harus berjuang memperbaiki kondisi ekonomi di dalam negerinya, menuju pemulihan ekonomi. Disamping pasokan dan kemampuan vaksinasi yang terbatas, keterbatasan kemampuan stimulus fiskal dan moneter juga menyebabkan lebih lambatnya proses pemulihan ekonomi. Sebagian besar EMDEs

mengalami keterbatasan untuk meningkatkan anggaran lebih besar, terutama karena penurunan penerimaan pajak oleh merosotnya aktivitas dunia usaha, serta keterbatasan kemampuan berhutang untuk membiayai defisit fiskal yang lebih besar. Sementara, efektivitas kebijakan moneter untuk mendorong perekonomian banyak terkendala karena tekanan inflasi yang tinggi dan sektor keuangan yang juga terdampak pandemi.

Ekonomi dunia diperkirakan tumbuh sekitar 5,7% pada 2021 dan 4,4% pada 2022, setelah kontraksi 3,1% pada 2020 (Tabel 1.1). Pemulihan ekonomi telah terjadi di dua negara ekonomi terbesar dunia, yaitu Tiongkok dengan pertumbuhan 8,1% dan 5,2% pada 2021 dan 2022 setelah tumbuh 2,3% pada 2020, dan AS dengan pertumbuhan 5,6% dan 3,8% pada 2021 dan 2022 setelah kontraksi 3,4% pada 2020. Sementara itu, pemulihan ekonomi negara-negara lain diperkirakan terjadi pada tahun 2022 dengan

Grafik 1.8. Paket Stimulus Fiskal Negara G20



Sumber: IMF, Statista (publikasi Nov 2021 untuk data Mei 2021)

Tabel 1.1. Proyeksi Ekonomi Global

Pertumbuhan PDB (Dalam satuan persen)	2019	2020	2021	2022
Dunia	2,8	-3,1	5,7	4,4
Negara AEs	1,6	-4,5	5,0	3,8
Amerika Serikat	2,2	-3,4	5,6	3,8
Kawasan Eropa	1,3	-6,3	5,0	4,2
Jepang	0,0	-4,6	1,9	2,7
Negara EMDEs	3,7	-2,1	6,1	4,8
Tiongkok	6,0	2,3	8,1	5,2
India ¹	4,8	-7,1	9,0	8,2
ASEAN-5	4,9	-3,4	3,9	5,4
Amerika Latin	0,1	-7,0	5,1	2,8
EMDEs Eropa	2,5	-2,0	4,7	3,7
Timur Tengah dan Asia Tengah	1,4	-2,8	4,1	3,8
Volume Perdagangan Dunia	-0,4	-5,3	9,8	3,8
Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia	-3,0	-0,8	59,6	2,8

¹Asumsi PDB India BI disesuaikan menjadi Tahun Kalender (estimasi)
Sumber: IMF WEO Oktober 2021 Database, Proyeksi Bank Indonesia, Realisasi 2018-2020 berdasarkan angka terkini

perbaikan ekonomi yang terus berlanjut sejak tahun 2021. Di antara AEs, kawasan Eropa diperkirakan tumbuh 5,0% dan 4,2% pada 2021 dan 2022 setelah kontraksi 6,3% pada 2020, demikian pula Jepang akan tumbuh 1,9% dan 2,7% pada 2021 dan 2022 setelah kontraksi 4,6% pada 2020. Di antara negara Asia, India diperkirakan tumbuh tinggi sekitar 9,0% dan 8,2% pada 2021 dan 2022 setelah kontraksi 7,1% pada 2020. Demikian pula ASEAN-5 akan tumbuh 3,9% dan 5,4% pada 2021 dan 2022 setelah kontraksi 3,4% pada 2020. Kenaikan volume perdagangan dunia dan harga komoditas terus berlanjut, sehingga menopang prospek ekspor dan pemulihan ekonomi di berbagai EMDEs. Pertumbuhan volume perdagangan dunia dan harga komoditas yang mengalami kontraksi sebesar 5,3% dan 0,8% pada tahun 2020, naik tajam pada tahun 2021 menjadi 9,8% dan 59,6%. Pemulihan ekonomi dunia diperkirakan lebih kuat pada paruh kedua tahun 2022 serta tahun 2023 dan selanjutnya.



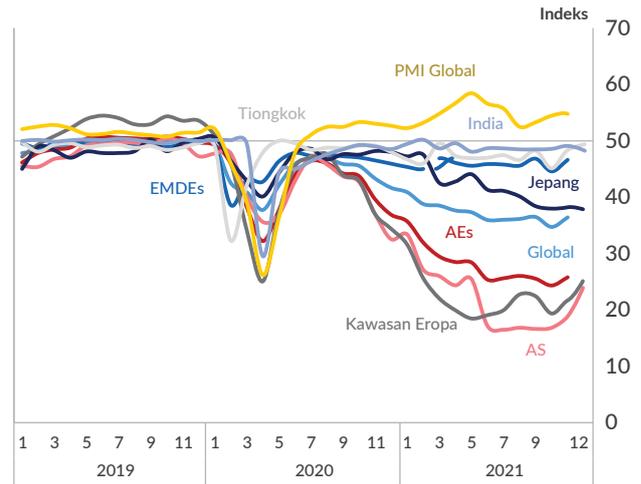
1.3

Gangguan dalam Mata Rantai Pasokan Global dan Kelangkaan Energi

Perbaikan aktivitas ekonomi pada tahun 2021 menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah. Kenaikan permintaan yang relatif cepat terutama pada awal tahun menyebabkan tertinggalnya kemampuan penyesuaian pasokan karena mobilitas yang belum kembali ke kondisi praCovid-19. Hal ini mendorong terjadinya gangguan rantai pasok global. Pada awal tahun, kendala pasokan diawali oleh kelangkaan semikonduktor akibat kenaikan permintaan terhadap teknologi pendukung *work from home*, seperti telepon genggam dan komputer, kemudian mengganggu pemulihan terutama di Jerman, Jepang, dan AS. Selain itu, perbaikan permintaan juga menyebabkan permasalahan distribusi dan pasokan barang input produksi yang kondisinya semakin diperparah dengan penutupan pelabuhan laut dan udara beberapa negara produsen di Asia akibat merebaknya varian Delta. Memasuki triwulan IV 2021, kendala pasokan terus meningkat akibat keterbatasan energi yang terjadi sejalan dengan penerapan kebijakan berorientasi ekonomi hijau, bencana alam, dan kenaikan permintaan musim dingin di banyak negara. Berbagai faktor ini mendorong kesenjangan antara produksi dengan permintaan serta meningkatkan berbagai harga komoditas dunia. Hal ini selanjutnya berdampak pada kenaikan inflasi aktual dan perkiraan tekanan inflasi ke depan di negara-negara AEs, meskipun cenderung temporer. Untuk itu, perkembangan ini perlu diwaspadai dan diantisipasi secara baik dampaknya terhadap perekonomian Indonesia.

Gangguan rantai pasok global secara luas menjadi fenomena baru yang perlu terus diwaspadai. Gangguan ini mencakup permasalahan distribusi antarnegara dan kelangkaan barang input. Kendala distribusi tercermin dari kelangkaan kontainer, tumpukan barang (*backlog*) di banyak pelabuhan, semakin lamanya waktu pengiriman, dan bahkan kenaikan biaya pengapalan barang antarnegara, khususnya sejak April 2021 (Grafik 1.9 dan 1.10). Permasalahan ini merambat pada berhentinya

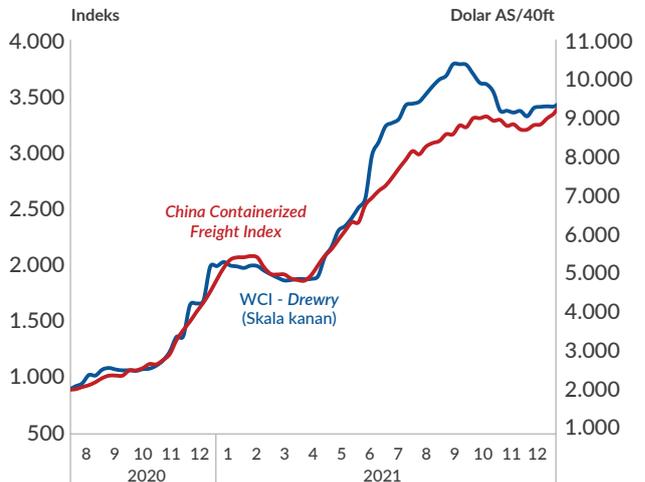
Grafik 1.9. Indikator Waktu Pengiriman



Sumber: IHS Markit

produksi di suatu negara akibat tidak terpenuhinya pasokan barang input dari negara lain. Di negara produsen, khususnya di Tiongkok dan negara Asia lainnya, pemberlakuan pembatasan mobilitas untuk penanganan penyebaran Covid-19 varian Delta menimbulkan penurunan produksi dan inventori, serta bahkan kemampuan dalam pengapalan. Selain itu, kelangkaan barang input juga terjadi akibat tingginya permintaan, contohnya pada semikonduktor, serta faktor kebijakan energi hijau

Grafik 1.10. Biaya Pengiriman



Sumber: Bloomberg

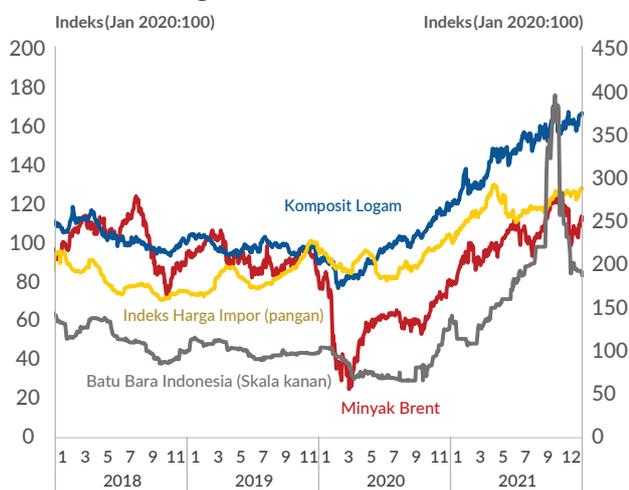


yang sempat mendorong kelangkaan batu bara, gas, dan minyak. Di AS, kesenjangan juga terjadi di pasar tenaga kerja seperti terlihat pada tingkat pengangguran sukarela (*voluntary unemployment*) yang masih meningkat dan kenaikan upah pada sektor-sektor jasa perhotelan dan restoran, pendidikan dan kesehatan, penjualan eceran, manufaktur, serta perdagangan.

Keterbatasan energi yang terjadi bersamaan dengan gangguan distribusi dan pasokan barang berdampak pada inflasi global. Selain ketidakseimbangan pemulihan ekonomi dan pembatasan mobilitas untuk penanganan Covid-19 di atas, permasalahan ini juga didorong oleh faktor kebijakan, yaitu semakin kuatnya tuntutan akan ekonomi hijau dari Eropa, AS dan juga Tiongkok, yang memerlukan masa transisi menuju ke produksi yang lebih ramah lingkungan. Pada waktu yang sama, permintaan energi meningkat

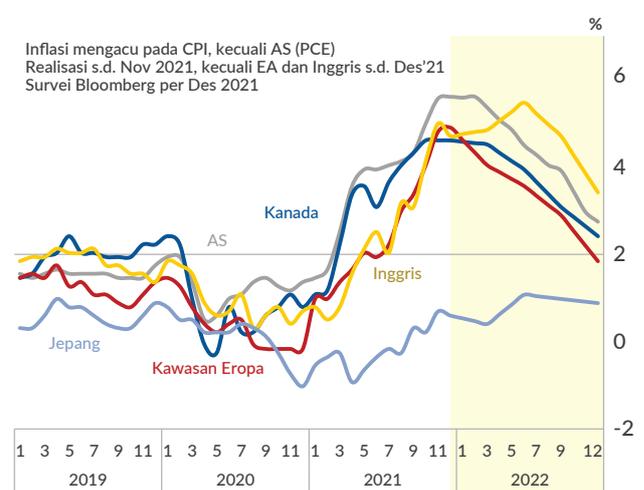
tinggi di belahan barat dunia untukantisipasi pasokan menghadapi musim dingin. Berbagai faktor ini mengakibatkan kesenjangan produksi-permintaan dan kenaikan harga-harga komoditas dunia, seperti harga minyak, batu bara, logam, serta pangan (Grafik 1.11). Dampak selanjutnya terjadi kenaikan inflasi secara aktual maupun ekspektasi inflasi ke depan di AEs, khususnya di AS, Eropa, Inggris, Kanada, dan Australia (Grafik1.12). Tekanan inflasi masih mencatat rekor tinggi di AS 5% dan Eropa 4,9% pada November 2021 sejalan dengan kenaikan harga energi. Sejalan dengan disrupsi pasokan yang berangsur mereda, inflasi di sejumlah AEs diperkirakan turut menurun pada pertengahan tahun 2022. Namun demikian, perkembangan ini perlu terus diwaspadai terutama sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian pada akhir tahun 2021 akibat munculnya kenaikan penyebaran varian Omicron.

Grafik 1.11. Harga Komoditas Dunia



Sumber: CEIC, IHS MarkitBloomberg, World Bank, diolah

Grafik 1.12. Proyeksi Inflasi Dunia



Sumber: Survei Bloomberg, Estimasi BI, diolah

1.4

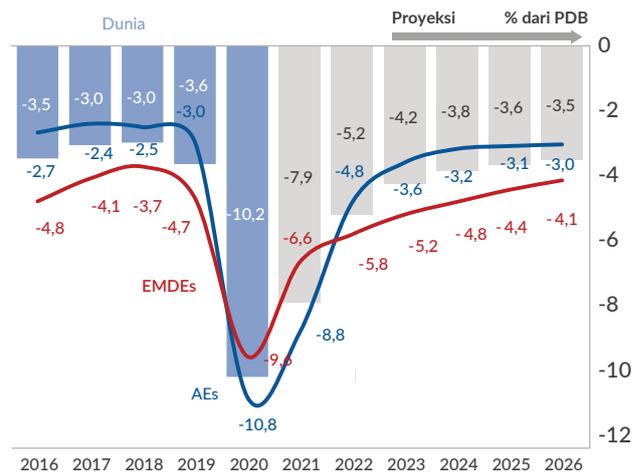
Ketidaksinkronan Rencana Kebijakan Moneter dan Fiskal serta Berlanjutnya Ketidakpastian Pasar Keuangan Global

Ketidakseimbangan pemulihan ekonomi, gangguan pasokan dan kelangkaan energi mendorong ketidaksinkronan rencana normalisasi kebijakan (*exit policy*) antara AEs dan EMDEs. Secara keseluruhan, semua negara akan melakukan normalisasi kebijakan fiskalnya dengan defisit yang mulai menurun sejak tahun 2021, meskipun tahapannya jauh lebih cepat di AEs sementara di EMDEs akan lebih bertahap (Grafik 1.13). Demikian pula kebijakan moneter, tekanan inflasi di atas target mendorong beberapa bank sentral EMDEs untuk meningkatkan suku bunganya, seperti di Ceko, Brasil, Meksiko, Rusia, dan Turki (Grafik 1.14). Selain itu, beberapa bank sentral AE juga telah bertahap mengurangi stimulus moneter seiring perbaikan ekonomi yang disertai peningkatan tekanan inflasi. Bank of Canada termasuk yang terdepan dalam menghentikan pembelian surat berharga, kemudian diperkirakan Bank of England, the Fed dan Reserve Bank of Australia akan melakukan hal yang sama setidaknya sampai dengan paruh I 2022. Perkembangan pada akhir 2021, the Fed telah mengumumkan siklus pengetatan kebijakan moneter yang lebih cepat.² Sementara itu, Bank of Korea, Norges Bank dan Reserve Bank of New Zealand sudah menaikkan suku bunga kebijakannya antara lain karena tekanan inflasi, aktivitas ekonomi telah baik, serta indikasi munculnya risiko stabilitas keuangan. Dinamika ini mendorong pelaku pasar memprediksikan kenaikan Fed Funds Rate lebih cepat, yakni pada paruh I 2022 dengan total kenaikan selama 2022 sebesar 75 bps.

Seiring dengan ketidaksinkronan *exit policy*, ketidakpastian pasar keuangan global masih terus berlanjut. Pada triwulan I 2021, ketidakpastian pasar

2 Kenaikan inflasi yang persisten tinggi mendorong the Fed mempercepat laju penurunan stimulus moneter (*tapering*) menjadi 2 kali lebih cepat sebesar 30 miliar dolar AS per bulan (terdiri dari pembelian UST sebesar 20 miliar dolar AS dan MBS sebesar 10 miliar dolar AS) dibanding laju penurunan pada November dan Desember 2021 sebesar 15 miliar dolar AS per bulan. Laju penurunan yang lebih besar tersebut akan mempercepat durasi penyelesaian *tapering* ke Maret 2022, kemudian memberi ruang bagi the Fed untuk menaikkan Fed Funds Rate (FFR)

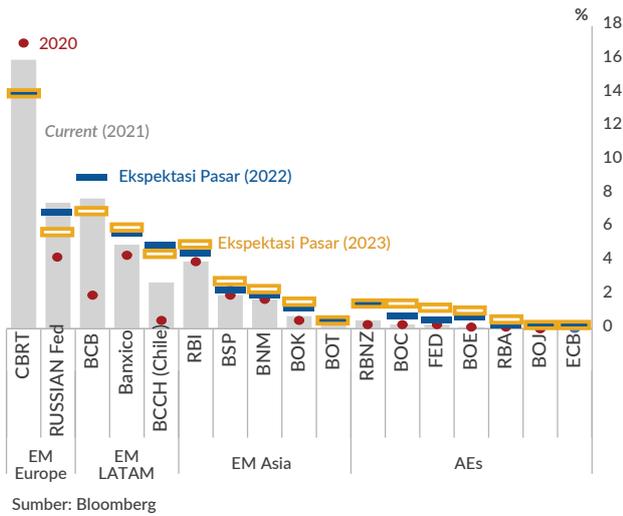
Grafik 1.13. Defisit Fiskal



Sumber: IMF Fiscal Monitoring Oktober 2021

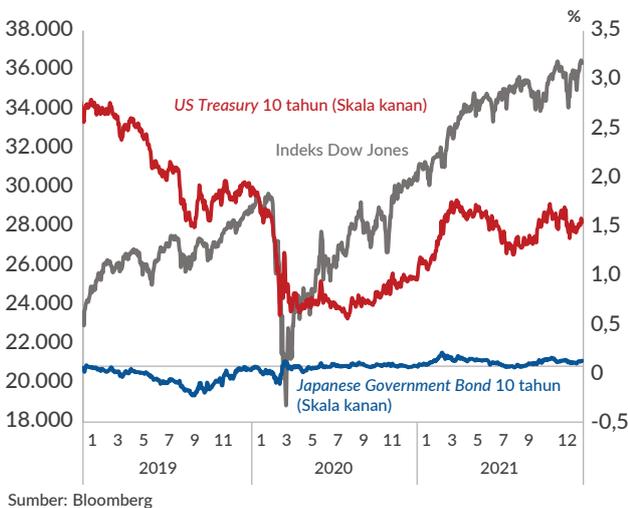


Grafik 1.14. Kebijakan Moneter



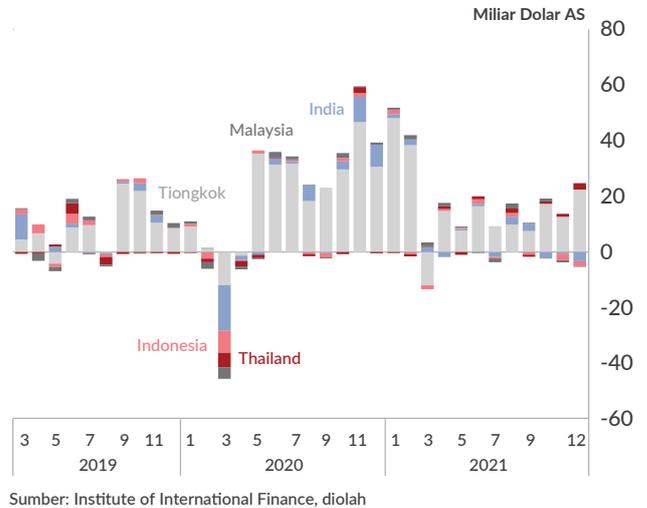
keuangan global meningkat disertai dengan kenaikan imbal hasil UST bond, seiring dengan reaksi pasar atas paket kebijakan fiskal AS yang lebih besar dan prospek pemulihan ekonomi AS yang lebih cepat (Grafik 1.15). Akibatnya, aliran investasi portofolio yang masuk ke negara EMs yang relatif tinggi pada awal tahun

Grafik 1.15. Pergerakan Yield dan Saham



2021 menurun secara cepat khususnya sejak Maret 2021 (Grafik 1.16) dan berdampak pada peningkatan tekanan dan volatilitas nilai tukar negara-negara EMs. Dalam perkembangannya, ketidakpastian pasar keuangan global menurun pada awal triwulan II 2021, sejalan dengan komunikasi the Fed yang transparan dan konsisten tentang arah kebijakan yang tetap akomodatif. Ketidakpastian pasar keuangan global pada paruh kedua 2021 masih berlangsung sejalan dengan risiko yang masih mengemuka, antara lain terkait peningkatan penyebaran Covid-19 varian Delta, antisipasi pasar terhadap kebijakan *tapering* the Fed, serta kekhawatiran tekanan inflasi yang berlangsung lebih lama akibat gangguan rantai pasokan dan keterbatasan energi. Ketidaksinkronan normalisasi kebijakan fiskal dan moneter serta meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global inilah yang semakin mempersulit upaya perbaikan menuju ke pemulihan ekonomi di negara-negara EMDEs, termasuk Indonesia.

Grafik 1.16. Aliran Investasi Portofolio

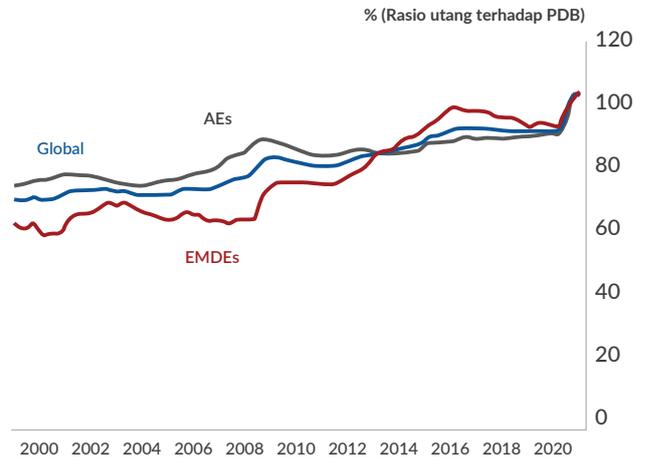


1.5

Dampak Luka Memar (*Scarring Effect*) dari Pandemi

Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan juga berdampak pada luka memar terhadap kondisi korporasi dan menimbulkan risiko pada ketahanan sistem keuangan. Pembatasan mobilitas manusia telah menyebabkan menurunnya aktivitas dunia usaha, sehingga berdampak pada merosotnya tingkat penjualan, likuiditas, profitabilitas, dan permodalan korporasi. Tingkat keberhutangan (*leverage*) meningkat sejak pandemi Covid-19, baik di AEs maupun EMDEs (Grafik 1.17). Bahkan, jumlah kegagalan korporasi melonjak hampir menyamai tingkat kegagalan pada krisis keuangan global, terbesar di AS kemudian Eropa dan EMDEs (Grafik 1.18). Tentu saja, tidak semua perusahaan mengalami luka memar yang sama, tergantung pada dampak pembatasan mobilitas terhadap sektor ekonomi masing-masing. Namun demikian, kondisi luka memar korporasi tersebut perlu terus dimonitor dan dicermati risiko dampak negatif pada kondisi perbankan secara individual maupun stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Hal ini mendorong otoritas pengawasan sektor keuangan di banyak negara cenderung memperpanjang relaksasi ketentuan untuk penundaan pembayaran pokok dan

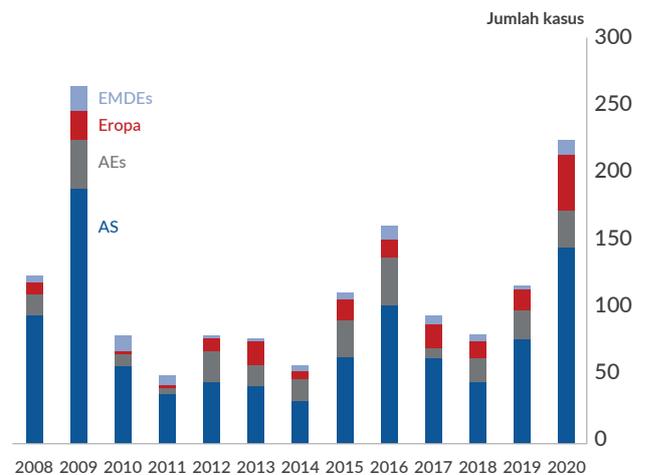
Grafik 1.17. *Leverage* Korporasi Nonfinansial



Sumber: IMF Global Financial Stability Report - International Monetary Fund, April 2021

angsuran, sehingga memberikan kelonggaran atas pengakuan kredit bermasalah *Non Performing Loan*, NPL pada perbankan. Permasalahan luka memar korporasi dan dampaknya pada lembaga dan stabilitas sistem keuangan ini tetap saja perlu diwaspadai dengan masih berlanjutnya pandemi Covid-19. Bahkan, meski secara keseluruhan ekonomi telah sepenuhnya pulih, luka memar korporasi dari pandemi Covid-19 tersebut masih perlu waktu untuk sembuh.

Grafik 1.18. Jumlah Kegagalan Korporasi



Sumber: Global Financial Stability Report - International Monetary Fund, April 2021

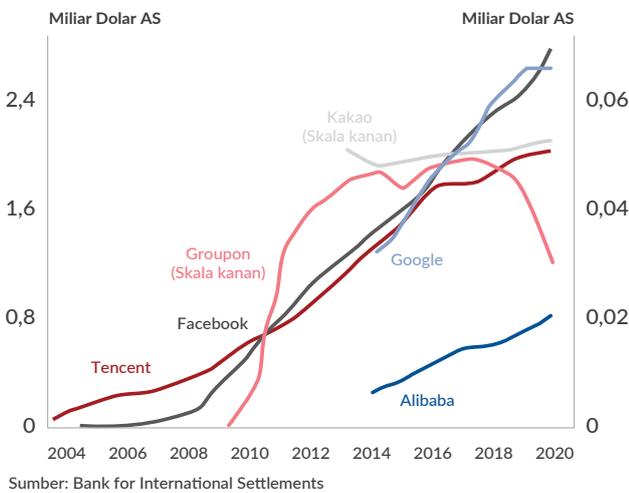


1.6

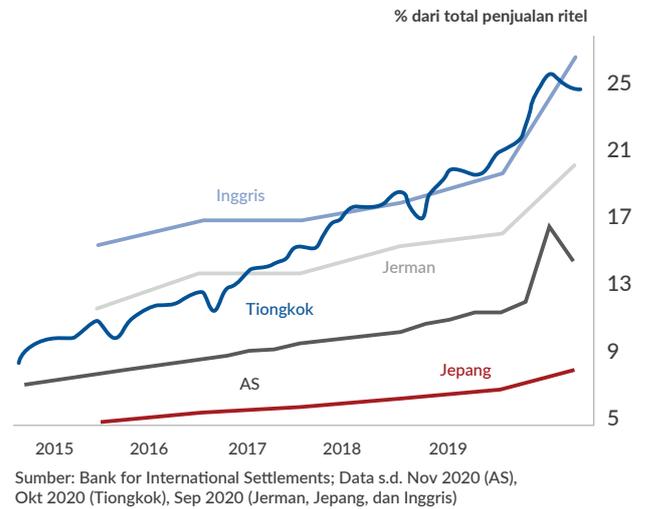
Cepatnya Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan

Digitalisasi sistem pembayaran dan ekonomi-keuangan berkembang sangat cepat, dengan semakin dominannya peran *BigTech* dan semakin meningkatnya *e-commerce*. Digitalisasi memang telah terjadi sebelum pandemi Covid-19, didorong oleh kemajuan teknologi digital termasuk intelegensia artifisial oleh perusahaan teknologi besar (*BigTech*) yang mampu menghadirkan jasa layanan pribadi dan ekonomi-keuangan kapanpun dan dimanapun (Grafik 1.19). Jasa layanan tersebut termasuk melalui platform *e-commerce* dengan volume dan frekuensi yang sangat besar meski nilai per transaksi yang kecil (Grafik 1.20). Sejak pandemi Covid-19, dengan pembatasan mobilitas aktivitas manusia, digitalisasi ekonomi keuangan dan sistem pembayaran berkembang sangat cepat. Transaksi ekonomi-

Grafik 1.19. Pengguna Aktif *BigTech*



Grafik 1.20. Pangsa *E-Commerce*



keuangan digital yang semula lebih banyak di kalangan muda dan generasi milenial, sekarang telah meluas ke berbagai lapisan masyarakat serta menjadi preferensi dan kebiasaan baru karena kemudahan, kecepatan, serta murahness harga dan biaya transaksi. Namun di sisi lain, muncul pula sejumlah permasalahan baru, termasuk kepemilikan dan perlindungan data pribadi, pajak transaksi ekonomi-keuangan digital, layanan jasa keuangan oleh entitas bukan lembaga keuangan (*shadow banking*), meluasnya mata uang yang diciptakan swasta (*cryptocurrency*), dan tingginya serangan siber. Berbagai peluang dan tantangan dari meluasnya ekonomi-keuangan digital ini perlu direspons dengan langkah-langkah kebijakan yang tepat untuk mendudukkan kembali peran negara dalam peradaban baru, yaitu peradaban digital.



Di tengah proses perbaikan ekonomi global, perkembangan teknologi digital membuka peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai “*new growth engine*”. Digitalisasi sistem pembayaran menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga momentum pemulihan aktivitas ekonomi di masyarakat. Perubahan teknologi mendorong transformasi digital pada sistem pembayaran yang menekankan mobilitas, kecepatan, efisiensi, fleksibilitas, integrasi serta keamanan data. Pembayaran digital melalui *E-payment* menguntungkan semua pihak yang terlibat, termasuk peningkatan produktivitas dan efisiensi. Ketersediaannya mendukung siklus ekonomi yang baik, yakni konsumsi meningkat

yang dilanjutkan pada peningkatan produksi, lebih banyak pekerjaan, pendapatan lebih besar, dan pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. Meski demikian, tantangan dalam mencapai sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal memerlukan peran bank sentral untuk mempersiapkan mekanisme, instrumen, legal, kelembagaan dan infrastruktur. Penataan industri sistem pembayaran merupakan keniscayaan, yakni restrukturisasi industri sehingga regulasi menjadi mutlak dilakukan. Selain itu, otoritas juga perlu mendukung perkembangan Ekonomi dan Keuangan Digital (EKD) yang bermanfaat pada pembentukan ekosistem pemrosesan pembayaran.

1.7

Semakin Kuatnya Tuntutan atas Ekonomi Hijau dan Keuangan Berkelanjutan

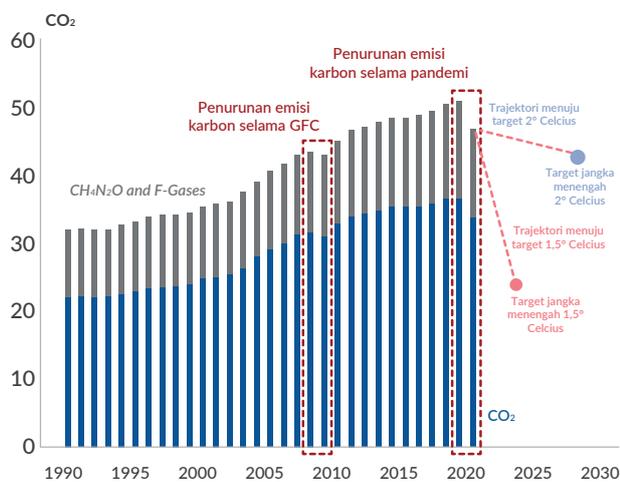
Pandemi Covid-19 juga meningkatkan tuntutan akan perlunya mempercepat ekonomi-keuangan hijau (*green economy and finance*). Sebelum pandemi Covid-19, berbagai negara telah menunjukkan komitmen sebagaimana pada *Paris Agreement 2015* untuk mengadopsi ekonomi-keuangan hijau dalam penanganan krisis perubahan iklim antara lain melalui pengurangan emisi karbon (Grafik 1.21). Dalam kaitan ini, berbagai negara berkomitmen untuk melakukan transisi menuju ekonomi-keuangan hijau, meski secara gradual untuk optimalisasi biaya akibat perubahan iklim. Sejak pandemi Covid-19, tuntutan ekonomi-keuangan hijau semakin kuat dari negara-negara maju, antara lain dengan penurunan emisi karbon yang jauh lebih besar yaitu sekitar 8-9% dibandingkan sekitar 2-3% selama krisis keuangan global 2008/2009 (Grafik 1.22). Oleh karena itu, program penurunan emisi karbon di berbagai negara terus diperkuat untuk memenuhi komitmen penurunan emisi karbon yang baru tersebut. Dukungan dan insentif pemerintah perlu terus dilakukan untuk mendorong proyek-proyek yang mencapai *carbon neutrality* melalui pengurangan emisi karbon, peningkatan efisiensi energi, dan

penggunaan sumber energi terbarukan. Pembiayaan hijau oleh perbankan dan pasar keuangan juga terus didorong termasuk melalui pemberian insentif dan disinsentif kebijakan pembiayaan fiskal Pemerintah dan kebijakan makprudensial hijau bank sentral.

Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim dapat menimbulkan risiko fisik dan risiko transisi yang berimplikasi pada stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan. Transisi menuju ekonomi hijau, yakni ekonomi rendah karbon, perlu dilakukan secara gradual dan moderat, untuk optimalisasi respons kebijakan akibat perubahan iklim. Inisiatif tersebut dilakukan untuk mendukung tercapainya target penurunan emisi karbon sebagaimana semangat dari *Paris Agreement 2015* untuk membatasi kenaikan suhu global bumi. Sektor keuangan perlu berkontribusi dalam penurunan emisi karbon. Target penurunan emisi karbon sulit tercapai tanpa sinergi lintas lembaga, yakni sektor fiskal, riil, dan keuangan. Dalam hal ini, perlu pembentukan infrastruktur keuangan hijau, yakni sertifikasi hijau bertaraf internasional, digitalisasi *platform* pasar hijau, dan digitalisasi data dan pasar hijau. Investasi hijau dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan cadangan devisa secara signifikan, antara lain melalui transisi menuju pembangkit listrik, alat transportasi, dan bangunan rendah karbon, serta transisi lainnya menuju ekonomi rendah karbon. Pasar keuangan hijau menjadi sumber pembiayaan utama investasi hijau. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah Singapura yang membuka bursa hijau global pada tahun 2021 dengan potensi pembiayaan di Asia senilai 1,7 triliun dolar AS per tahun.

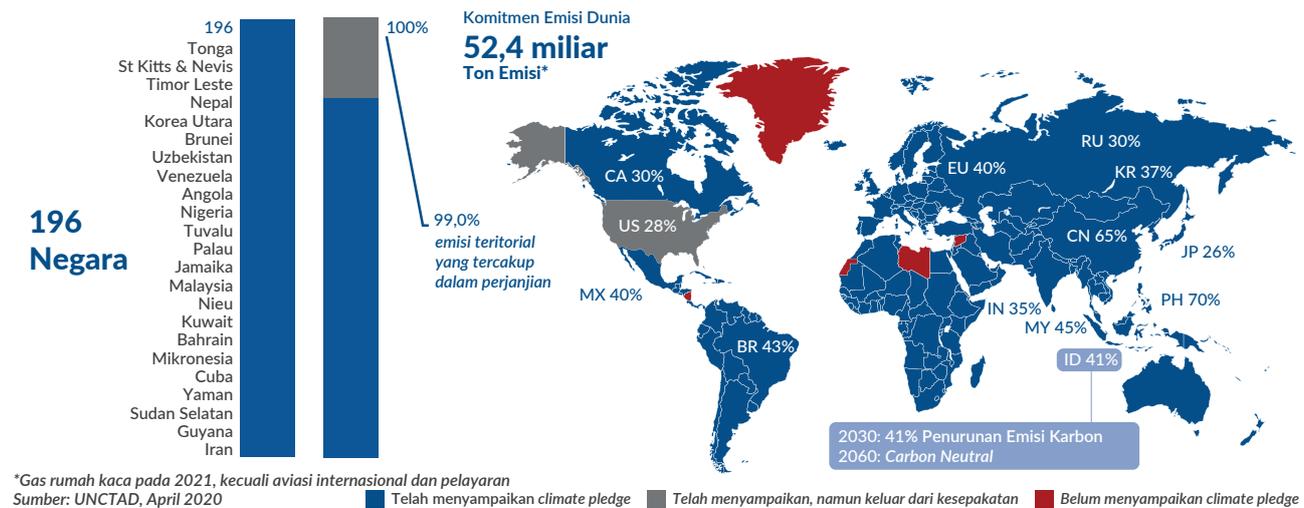
Sejumlah langkah koordinasi kebijakan internasional ditempuh untuk terus memperkuat pemulihan ekonomi global dan mengatasi berbagai permasalahan yang muncul di atas. Sejumlah agenda penting mengemuka di forum-forum G20, IMF, FSB,

Grafik 1.21. Emisi Karbon dan Target Penurunan



Sumber: United Nations Conference on Trade and Development

Grafik 1.22. Paris Agreement



BIS, maupun lainnya. *Pertama*, perlunya semakin memperluas pasokan dan distribusi vaksin dari AEs ke EMDEs, termasuk pemberian pinjaman lunak dan pengurangan utang (*debt relief*) bagi *Less Developed Countries* (LDCs) serta tambahan alokasi *Special Drawing Rights* (SDR) khusus dengan permintaan agar negara AEs dan EMDEs untuk berpartisipasi dalam membantu LDCs. *Kedua*, perlunya penahanan dan kejelasan komunikasi dalam normalisasi kebijakan fiskal dan moneter (*exit policy*) untuk mengatasi permasalahan ketidakseimbangan pemulihan ekonomi global serta dampak yang ditimbulkannya bagi stabilitas pasar keuangan global. *Ketiga*, perlunya langkah-langkah bersama untuk mengatasi gangguan dalam mata rantai pasokan global serta kelangkaan energi agar tetap mendukung pemulihan ekonomi dan mengatasi lonjakan inflasi global. *Keempat*, perlunya kebijakan baik dari sisi fiskal, moneter, makroprudensial, pengaturan lembaga keuangan, maupun di sektor riil (seperti reformasi struktural dan tenaga kerja) untuk mengatasi dampak luka memar dari pandemi terhadap kondisi korporasi agar tidak mengganggu keberlanjutan pemulihan ekonomi dan mencegah risiko rambatan terhadap stabilitas sistem keuangan.

Kelima, perlunya mempercepat kerja sama internasional dalam akselerasi digitalisasi ekonomi-keuangan, termasuk kerja sama sistem pembayaran antar negara (*cross-border payments system*), pengembangan *Central Bank Digital Currency* (CBDC), pengaturan dan pengawasan untuk *BigTech*, data, serangan siber, serta perluasan digitalisasi untuk inklusi ekonomi-keuangan seperti remitansi,

perdagangan ritel, dan UMKM. *Keenam*, perlunya masa transisi menuju ekonomi-keuangan hijau, termasuk dalam pemenuhan dan transparansi data emisi karbon, penyusunan program transisi emisi karbon, pajak karbon, hingga pengembangan produk keuangan hijau (*sustainable finance*). *Ketujuh*, perlunya terus mencermati dan mengantisipasi dalam merumuskan langkah kebijakan yang diperlukan di Indonesia terhadap berbagai agenda internasional yang mewarnai berbagai pembahasan dalam forum-forum kerja sama internasional, termasuk G20, IMF, FSB, dan BIS tersebut. Hal ini semakin penting dengan Presidensi Indonesia pada G20 pada tahun 2022 mendatang (Tabel 1.2).

Berbagai kebijakan dilakukan oleh lembaga internasional, seperti IMF, FSB, dan World Bank di sepanjang tahun 2021 untuk mendukung proses pemulihan ekonomi dunia. Kebijakan lembaga internasional berfokus pada kebijakan untuk mendukung resiliensi ekonomi global dan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Mobilisasi dana guna mendukung penguatan resiliensi ekonomi yang terdampak oleh pandemi masih menjadi salah satu fokus utama kebijakan lembaga internasional di tahun 2021. Mobilisasi dana terutama dilakukan melalui penyaluran SDR IMF senilai 650 miliar dolar AS yang efektif berlaku pada 23 Agustus 2021. Dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini, negara pemilik SDR dimungkinkan untuk membeli atau menjual SDR baik pada *spot* maupun *forward*; meminjam dan meminjamkan SDR; menggunakan SDR dalam transaksi *swap*; atau menggunakan atau menerima donasi SDR. Hal ini bertujuan untuk membuka ruang

Tabel 1.2. Tema, Fokus, dan Agenda Prioritas Presidensi G20 Indonesia

Presidensi G20 Indonesia "Recover Together, Recover Stronger"	
Fokus: mendorong produktivitas, meningkatkan ketahanan dan stabilitas ekonomi, dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif	
6 (Enam) Agenda Prioritas pada Jalur Keuangan :	
1	Perumusan normalisasi kebijakan (<i>exit strategy</i>) khususnya oleh AS dan sejumlah AEs lainnya agar tetap kondusif bagi pemulihan ekonomi dunia yang merata dan seimbang (<i>recover together</i>), serta memitigasi risiko ketidakpastian pasar keuangan global dengan perhitungan matang (<i>well calibrated</i>), rencana seksama (<i>well planned</i>), dan komunikasi jelas (<i>well communicated</i>)
2	Perumusan respons kebijakan reformasi struktural di sektor riil untuk mengatasi luka memar (<i>scarring effect</i>) dari pandemi Covid-19 dengan meningkatkan produktivitas serta mengatasi sejumlah permasalahan ketenagakerjaan, rumah tangga, korporasi dan sektor keuangan dalam rangka kembali ke lintasan pertumbuhan ekonomi jangka panjang
3	Peningkatan kerja sama antar negara dalam sistem pembayaran digital melalui implementasi keseluruhan <i>G20 Roadmap for Enhancing Cross Border Payments</i> (CBP) dan pengembangan prinsip-prinsip pengembangan CBDC (<i>General Principles for Developing CBDC</i>).
4	Perumusan langkah-langkah menuju ekonomi hijau (<i>green economy</i>) dan keuangan berkelanjutan (<i>sustainable finance</i>) dengan mengatasi risiko perubahan iklim dan transisi ke ekonomi rendah karbon khususnya dari sudut pandang makroekonomi dan stabilitas keuangan.
5	Peningkatan produktivitas dan perluasan ekonomi dan keuangan inklusif melalui peningkatan kapasitas kewirausahaan dan pemanfaatan <i>open banking</i> , khususnya bagi UMKM, wanita, dan pemuda, termasuk aspek lintas batas.
6	Koordinasi internasional dalam agenda perpajakan untuk mencapai sistem perpajakan internasional yang adil, berkelanjutan, dan modern, termasuk melanjutkan implementasi dari kesepakatan global terkait perpajakan digital dan pajak karbon yang telah dicapai pada 2021.

bagi negara dengan kondisi eksternal yang kuat mengalokasikan SDR yang dimiliki kepada negara dengan kondisi eksternal yang lemah atau rentan dalam rangka pemulihan ekonomi dari pandemi.³

Moratorium pembayaran utang bagi negara berpendapatan rendah (*Low Income Countries, LICs*) juga masih menjadi salah satu fokus kebijakan lembaga internasional di tahun 2021. Periode moratorium pembayaran utang untuk kelompok LICs pada *Debt Service Suspension Initiatives (DSSI)*⁴ disepakati untuk diperpanjang hingga akhir Desember 2021 (dari Juni 2021). Inisiatif yang disepakati oleh negara G20 pada Maret 2020 serta dimonitor oleh IMF dan World Bank tersebut bertujuan untuk memberikan ruang fiskal bagi negara yang

memerlukan untuk dapat memfokuskan pengeluaran fiskalnya pada pembiayaan untuk menangani pandemi Covid-19. Perpanjangan periode tersebut disepakati sebagai yang terakhir dan penyelesaian utang negara-negara tersebut selanjutnya akan dilakukan dengan pendekatan struktural melalui *Common Framework for Debt Treatment beyond DSSI*.

FSB berperan menjaga stabilitas sistem keuangan global melalui penguatan kajian analitis dan evaluasi kebijakan yang telah dilakukan sebagai respons terhadap pandemi. Fokus utama FSB di antaranya adalah asesmen kerentanan dan program kerja untuk penguatan resiliensi IKNB, *toolkit* respons dan pemulihan dari insiden siber (*cyber incident*), asesmen implikasi regulasi dan pengawasan dari *global stablecoins arrangements*, pengembangan *roadmap* untuk penguatan pembayaran lintas batas (*cross-border*), dan pengembangan *roadmap* untuk mengatasi risiko di sistem keuangan yang terkait dengan perubahan iklim. Di samping itu, FSB juga terus memantau dan mendorong implementasi standar internasional dalam konteks reformasi *regulatory*

3 Di samping alokasi SDR, mobilisasi dana, khususnya bagi kelompok negara berpendapatan rendah (LICs), juga didorong untuk ditingkatkan melalui (i) *lending arm* lembaga internasional, seperti International Development Association (IDA) World Bank, (ii) fasilitas pinjaman IMF bagi negara miskin (*Poverty Reduction and Growth Trust/PRGT*), (iii) program keringanan utang IMF (*Catastrophe Containment Relief Trusts/CCRT*), serta melalui (iv) *Multinational Development Banks (MDBs)*.

4 Persyaratan DSSI: Negara berpendapatan rendah (*Low Income Country*) yang aktif selama periode FY20 dalam International Development Association (IDA) dan United Nations Least Developed Countries (UN LDC).



framework pascakrisis 2008, seperti Basel III, yang pemenuhannya sempat diberikan kelonggaran pada 2020 karena pandemi. Pemenuhan elemen inti Basel III dinilai sudah sesuai dengan *timeline* namun pemenuhan elemen lain seperti *capital framework* memerlukan dorongan yang lebih kuat, serta kerja sama, koordinasi, dan komunikasi internasional, dengan dukungan G20.

Kebijakan World Bank secara umum berfokus pada pemberian dukungan bagi negara yang membutuhkan. Beberapa kebijakan dikeluarkan untuk mengatasi kondisi darurat kesehatan, memperkuat sistem kesehatan dan kesiapsiagaan pandemi, melindungi penduduk miskin dan rentan, dan mendukung proses transisi menuju ekonomi hijau. Di tahun 2021, World Bank telah menyalurkan pendanaan sejumlah 6,3 miliar dolar AS untuk pembelian dan distribusi vaksin di lebih

dari 64 EMDEs. World Bank juga melakukan kemitraan dengan COVAX dan African Union untuk mendukung pembelian dan distribusi vaksin bagi 400 juta orang. Di samping itu, bersama lembaga internasional lain seperti IMF, WTO, WHO, dan World Bank membentuk *Multilateral Leaders Task Force on Covid-19* untuk mempercepat akses terhadap vaksin dan peralatan kesehatan esensial bagi negara berkembang melalui kerjasama keuangan dan perdagangan multilateral. Di dunia pendidikan, World Bank melakukan proyek pendidikan yang menjangkau 432 juta siswa dan 26 juta guru untuk mengatasi dampak *learning poverty* akibat pandemi Covid-19. Terkait dengan perubahan iklim, World Bank merilis *Climate Change Action Plan 2021-2025* yang bertujuan untuk menyalurkan pendanaan untuk proyek-proyek hijau di negara berkembang, memperkuat adaptasi, dan menyelaraskan arus keuangan dengan tujuan *Paris Agreement*.

